# LAPORAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT TAHUN 2024 **KATA PENGANTAR** 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas ijin-Nya sehingga Laporan

Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biro Organisasi

Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dapat disusun dengan

baik sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan

pelayanan Data dan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur tahun 2024.

Tujuan dari pembuatan laporan ini untuk memberikan informasi tentang tugas

pokok, fungsi dan kewenangan serta memberikan gambaran tentang pelaksanaan

kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang dicapai

serta hambatan atau kendala yang dihadapi.

Laporan ini menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan

PPID Pembantu Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke

depan dan disadari bahwa pengelolaan PPID Pembantu Biro Organisasi Sekretariat

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih jauh dari harapan, oleh sebab itu kami

membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan sehingga dapat menjadi bahan

perbaikan untuk masa yang datang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai

bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja PPID Pembantu Biro Organisasi Sekretariat

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikian laporan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, Februari 2025

Plt. Kepala Biro Organisasi

Seketariat Daerah

≅ Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Djoese S. M. Nai Buti, S.Pt, M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP 197103291999031002

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
BAB I GAMABARAN UMUM KENIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Asas Pelayanan Publik	3
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
A. Struktur Organisasi	4
B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	6
C. Sumber Daya Pelayanan Informasi Publik	7
D. Waktu Pelayanan Informasi	7
E. Anggaran Pelayanan Informasi	7
BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	8
A. Kategori Informasi Publik	8
B. Saluran Layanan Informasi	8
C. Daftar Informasi Publik	9
D. Informasi yang Dikecualikan	11
E. Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi	11
F. Kenadala dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	12
BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT DAN KESIMPULAN	13
A. Rencana Tindak Lanjut	13
B. Kesimpulan	13
RAR V DENI ITI ID	1/

LAMPIRAN

#### **BABI**

#### GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### A. Latar Belakang

Di era digital saat ini keterbukaan informasi publik merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang untuk pengembangan pribadi dan sosial, serta merupakan jaminan hukum untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F, yang menyebutkan bahwa : "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008 mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan negara harus dilakukan secara terbuka atau transparan. Setiap orang dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Ini antara lain bertujuan agar penyelenggaraan negara dapat diawasi oleh publik dan keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan publik semakin tinggi. Keterlibatan tersebut pada akhirnya akan menghasilkan penyeleggaraan negara yang lebih berkualitas. Partisipasi seperti itu menghendaki adanya jaminan terhadap keterbukaan informasi publik.

Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan hukum yang mengatur antara lain tentang:

- 1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik;
- 2. Kewajiban setiap badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan dengan cara sederhana;
- 3. Informasi dengan pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas;
- 4. Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

#### B. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkungan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 11. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2020 tentang Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### C. Asas Pelayanan Publik

Dalam Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan jika dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus mengacu pada beberapa asas, yakni:

- 1. <u>Kepentingan umum</u> artinya pelayanan publik digunakan, dimanfaatkan, dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum;
- 2. <u>Kepastian hukum</u> artinya pelayanan publik memiliki dan mengikuti kepastian hukum, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanannya;
- 3. <u>Kesamaan hak</u> artinya masyarakat memiliki kesamaan hak dalam menerima pelayanan publik;
- 4. <u>Keseimbangan hak dan kewajiban</u> artinya pihak-pihak yang berkaitan dengan pelayanan publik memiliki hak dan kewajiban yang sama;
- 5. <u>Profesional</u> artinya dalam menjalankan tugas, pihak yang terlibat dalam pelayanan publik haruslah bersikap professional;
- 6. <u>Partisipatif</u> artinya pihak yang terlibat dalam pelayanan publik harus bersikap partisipatif.;
- 7. <u>Tidak diskriminatif</u> artinya semua masyarakat, tanpa terkecuali, harus mendapat perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif;
- 8. <u>Keterbukaan</u> artinya seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan publik harus terbuka, misalnya dalam penyampaian informasi;
- 9. <u>Akuntabilitas</u> artinya pihak pelayanan publik harus memiliki akuntabilitas atau bertanggung jawab;
- 10. Fasilitas dan perlakukan khusus bagi kelompok rentan artinya pihak pelayanan publik harus memberikan fasilitas serta perlakukan khusus bagi mereka yang masuk dalam kelompok rentan;
- 11. <u>Ketepatan waktu</u> artinya pelayanan dan tugas harus senantiasa dilakukan dengan mengutamakan ketepatan waktu;
- 12. <u>Cepat, mudah, dan terjangkau</u> artinya pelayanan publik harus cepat, mudah atau tidak berbelit-belit, dan terjangkau atau aksesnya mudah.

#### **BAB II**

#### **GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 400.14.3/16a/BO1.1 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, maka disusun Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti pada tabel 1 :

Tabel 1. Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Organisasi Setda Provinsi NTT

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan	Rincian Tugas
1	2	3	4
1.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Pengarah	a) Merumuskan kebijakan, strategi dan program Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; b) Melakukan koordinasi, pengendalian dan pemantapan pelaksanaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu; dan c) Mengembangkan dan mengarahkan pelaksanaan Dokumentasi Pembantu untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
2.	Kepala Bagian Tata Laksana	Koordinator Tatalaksana	a) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Biro
	a. Analis Kebijakan Ahli Muda (Tatalaksana Pemerintahan) b. Analis Kebijakan Ahli Muda (Pelayanan Publik)	Anggota	Organisasi Setda Provinsi NTT; b) Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses sengeketa informasi yang diajukan pemohon c) Melakukan evaluasi dan
4.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan	pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan	Rincian Tugas
1	2	3	4
	a. Analis Kebijakan Ahli Muda (Kelembagaan) b. Analis Kebijakan Ahli Muda (Analisis Jabatan)	Anggota	d) Memeriksa dan memverifikasi permohonan keberatan informasi; dan e) Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja  a. Analis Kebijakan Ahli Muda (Reformasi Birokrasi) b. Analis Kebijakan Ahli Muda (Akuntabilitas Kinerja)	Koordinator Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Anggota	
8.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha  a. Johanis Dominggus Kale, S.Pt b. Theresia Firmiati Gelok, S.E., M.M	Anggota	a) Memfasilitasi pelaksanaan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan informasi publik; b) Menyiapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) layanan informasi publik. c) Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; d) Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses publik; e) Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID Utama; f) Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip layanan informasi publik; g) Mencatat permohonan informasi dalam register pemohon; h) Menyusun daftar informasi publik; i) Memberikan masukan kepada atasan dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon j) Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasi serta uji konsekuensi informasi publik; dan k) Membantu menyelesaikan sengketa publik

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan	Rincian Tugas
1	2	3	4
6.	a. Agustinus Randyson, S.STP	Anggota/Admin Kelembagaan dan Analisis	<ul> <li>a) Mengklasifikasi informasi yang terdiri dari:</li> <li>1) Informasi yang wajib</li> </ul>
	b. Elscha Liany Chintia Klaas, S.Kom	Jabatan	diumumkan secara serta merta; 2) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
			3) Informasi yang dikecualikan. b) Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi public yang ada dilingkungannya;
	a. Louisa Kristofora Lake, S.T	Anggota/Admin Tatalaksana	c) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
	b. Halimah Abdullah, SE		d) Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan
	c. Petrus Damasus Wawo Aja, S.STP		dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik; e) Melakukan pemutakhiran
	a. Vitarianda Angelina Taka, S.STP	Anggota/Admin Reformasi Birokrasi dan	informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya; dan f) Membuat dan mengumpulkan data
	b. Daniel Melkias Libing, S.STP	Akuntabilitas Kinerja	layanan informasi publik;

### B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik di Biro Organisasi Setda Provinsi NTT :

- Buku tamu manual, barcode buku tamu, barcode Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- 2. Meja dan kursi petugas, serta kursi tamu;
- 3. PC/laptop yang terhubung dengan koneksi internet;

#### C. Sumber Daya Pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada PPID Pembantu adalah seluruh Sumber Daya Manusia yang ada pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### D. Waktu Pelayanan Informasi

Waktu pelayanan informasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur efektif setiap hari kerja. Apabila diluar jam kerja dapat diajukan melalui portal PPID utama, email, surat maupun media sosial.

Adapun jadwal pelayanan informasi sebagai berikut :

1. Hari Senin s/d Kamis

Pukul: 08.00 s/d 16.00 WITA

2. Hari Jumat

Pukul: 08.00 s/d 16.30 WITA

#### E. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Tahun 2024 belum dianggarkan pada DPA kegiatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### **BAB III**

#### PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### A. Ketegori Informasi Publik

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari beberapa jenis informasi anatara lain :

- Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala (sesuai ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik);
- Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta (sesuai ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik);
- Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat (sesuai ketentuan pasal 10 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik);
- Informasi yang Dikecualikan (sesuai ketentuan Bab V pasal 17 s/d 20 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Bab IV pasal 14 s/d 18 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).

#### B. Saluran Layanan Informasi

Layanan informasi publik dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut :

1. Datang langsung: Menemui petugas pelayanan informasi publik;

2. Surat : Dialamatkan kepada Biro Organisasi Sekretariat DaerahProvinsi NTT, Jln. El tari No. 52, Kota Raja – Kupang;

3. Aplikasi surat permohonan elektronik pada portal PPID Utama : http://ppidutama.nttprov.go.id .

#### C. Daftar Informasi Publik

Sebagai Badan Publik, Biro Organisasi Setda Provinsi NTT memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan Daftar Informasi Publik yang bersifat berkala dan setiap saat. Daftar Informasi Publik yang telah dipublikasikan pada website PPID, seperti yang disajikan dalam tabel 2 :

Tabel 2. Daftar Informasi Publik Biro Organisasi Setda Provinsi NTT yang telah dipublikasikan pada website PPID

JUDUL \$	JENIS \$	KATEGORI \$
PERJANJIAN KINERJA ASN BIRO ORGANISASI TAHUN 2024	Informasi Kinerja	Setiap Saat
Pedoman KOIN YANLIK 2024	Regulasi	Setiap Saat
Standar Operasional Posedur (SOP) Biro Organisasi Tahun 2024	Regulasi	Setiap Saat
Peraturan Gubernur NTT Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Pola Hubungan Kerja Staf Ahli gubernur dan Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi NTT	Regulasi	Setiap Saat
Laporan Kinerja Triwulan III Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	Informasi Kinerja	Berkala
SURAT PEMBUKAAN KOIN-YANLIK 2024 KABKOTASURAT PEMBUKAAN KOIN-YANLIK 2024 PERANGKAT DAERAH PROVINSI	Program dan Kegiatan	Berkala
SURAT PEMBUKAAN KOIN-YANLIK 2024 KABKOTASURAT PEMBUKAAN KOIN-YANLIK 2024 KAB/KOTA	Program dan Kegiatan	Berkala
Keputusan Gubernur Nomor 119/KEP/HK/2024 Tentang SOP Biro Organisasi Setda Prov NTT	Regulasi	Setiap Saat
RKA Biro Organisasi Setda Prov NTT TA 2025	Laporan Keuangan	Setiap Saat
SE Gub No 30 ttg Penggunaan Pakaian Dinas PNS dan Tenaga Kontrak Pemprov NTT	Regulasi	Setiap Saat
PERGUB 82 TAHUN 2021 TTG PEDOMAN NOMOR KENDARAAN DINAS	Regulasi	Setiap Saat
Laporan Hasil Monev LHKAN Biro Organisasi Setda Provinsi NTT per Tanggal 26 Maret 2024	Informasi Kinerja	Setiap Saat
DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI NTT TAHUN 2024	Program dan Kegiatan	Setiap Saat
DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK) BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI NTT TAHUN 2024	Program dan Kegiatan	Setiap Saat
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Biro Organisasi Setda Provinsi NTT Triwulan II Tahun 2024	Informasi Kinerja	Berkala
Laporan Monev Kinerja Triwulan I 2024 Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Informasi Kinerja	Berkala
Rencana Aksi Biro Organisasi Tahun 2024	Informasi Kinerja	Setiap Saat
IKU Biro Organisasi 2024 - 2026	Informasi Kinerja	Setiap Saat
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 102 TAHUN 2019 TENTANG STANDARISASI PENOMORAN NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Regulasi	Setiap Saat
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 80 TAHUN 2019 tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Regulasi	Setiap Saat

DOTAS ELLANDRO AND JOURNALS SCRIPT TO AND 2024  Program den Progra	JUDUL \$	JENIS \$	KATEGORI \$
Program den Kogentes Program d	Laporan Monev Kinerja Triwulan II 2024 Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Informasi Kinerja	Berkala
PROTECTION OF THE PROPERTY OF THE CONTROL TO THE CONTROL OF THE CO	DATA KELEMBAGAAN KABUPATEN & KOTA TAHUN 2024	Informasi Kinerja	Setiap Saat
Leptoren Monitoring der Evalues Kinneys Treuden (Talum 2024)  Leptoren Heil Calusas Kinneys Presender (Derech Provinci NTT)  Str. Min Monitoring der Evalues Kinneys Presender (Derech Provinci NTT)  Str. Min Monitoring der Evalues Kinneys Presender (Derech Provinci NTT)  Str. Min Monitoring der Evalues (Scherburger (	Rencana Aksi Biro Organisasi Setda Provinsi NTT Tahun 2024	Program dan Kegiatan	Setiap Saat
Luporan Hosti Calusari Kirichasari Kriengia Claerah Trovinsi NTT  Seting Saxt  Regulate  Seting Saxt  Defect Romment PROS Bro Organizasi Seting Provinsi NTT Fahran 2024  Profit Bedeen Publish  Berkind  Berkind  Berkind  Berkind  Program dan Segistan  Berkind  Berkind  Seting Sinuktur Organizasi Seting Provinsi NTT Fahran 2024  Profit Bedeen Publish  Berkind  Berk	PAKTA INTEGRITAS BIRO ORGANISASI 2024	Informasi Kinerja	Setiap Saat
SK TIM Monogenion Riskle BD 2024  Section State  Regulated  Section State  Regulated  Section State  Regulated  Section State  Regulated  Section State  Profit Baden Pubble  Bendad  Duther Monogenia PROS Bits Organizated Section Provinci NTT Tahun 2024  Profit Baden Pubble  Bendad  Bendad  BROCANA STRATEGG (BENSTRA) SECTION PROVINCI NTT Tahun 2024  Profit Baden Pubble  Bendad  Brochan Strateggeran (DUS PROS Bits Organizated Section Provinci NTT Tahun 2024  Profit Baden Pubble  Bendad  Brochan Strateggeran (DUS PROS Bits Organizated Section Provinci Ntara Tereggera Termur  Profit Baden Pubble  Bendad (Provinci Ntara Tereggera Termur)  Profit Baden Pubble  Bendad (Provinci Ntara Termur)  Bendad (Provinci Nt	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024	Informasi Kinerja	Berkala
SCHM KERNA BRIO ORGANISASI 2024  Perdit Badan Publik  Berhald  Ber	Laporan Hasil Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi NTT	Informasi Kinerja	Setiap Saat
Delian Nominard PNS Bits Organisas Sectio Province NTT Tahun 2024 Profit Boden Publik Berkale  Delian Union Kepangkara (DUN) PNS Bits Organisas Sectio Province NTT Tahun 2024 Profit Boden Publik Berkale  RENCANA STRATEGIS (RINSTRA) SETIOA PROVINCE NTT TAHUN 2024-2026 Program den Kegasan Berkale  Berkale  Berkale  Begins Servaksar Organisas Birs Organisas Sectio Province NTT Tahun 2023 Informaci Rinerja  Servaksar Organisas Birs Organisas Section Province NTT Tahun 2023 Informaci Rinerja  Servaksar Organisas Prangkar Dearah (Renya OPO) Selverarias Dearah Province Ntias Tanggara Timur Tahun 2025 Program dan Kegasan  Servaksar Organisas Prangkar Dearah (Renya OPO) Selverarias Dearah Province Ntias Tanggara Timur Tahun 2025 Program dan Kegasan  Servaksar Organisas Prangkar Dearah (Renya OPO) Selverarias Dearah Province Ntias Tanggara Timur Tahun 2025 Program dan Kegasan  Servaksar Organisas Prangkar Dearah (Renya OPO) Selverarias Dearah Province Ntias Tanggara Timur Tahun 2025 Program dan Kegasan  Servaksar Organisas Prangkar Dearah (Renya OPO) Selverarias Dearah Province Ntias Tanggara Timur Tahun 2023 Informaci Kinerja  Berhale  Program dan Kegasan  Servaksar Organisas Section Province Nti Tahun 2023 Informaci Kinerja  Berhale  Program dan Dearah Province Nti Kineria  Regulasi Servaksar Dearah Province Nti Kineria  Servaksar	SK TIM Menejemen Risiko BO 2024	Regulasi	Setiap Saat
Deliar Unican Kepangkaan (DUR) PKS Bire Organisas Seide Provinsi NTT Tahun 2024.  Predit Baden Publik Berkata  RENCANA STRATIGG (RENSTRA) SETDA PROVINSI NTT TAHUN 2024-2025  Bagan Snuktur Organisas Bire Organisas Seides Provinsi Nusa Tenggara Timur  Predit Baden Publik Berkata  Survey Kepusasin Masyaraket (DMI) pada Bire Organisas Seides Provinsi NITT Tahun 2023  Informasi Kirerja Seisep Saat  Rencana Kepia Organisas Perangkat Deerah (Renja DYD) Sehresarisa Deerah Provinsi Nita Tahun 2023  Rencana Kepia Organisas Perangkat Deerah (Renja DYD) Sehresarisa Deerah Provinsi Nita Tahun 2023  Rencana Kepia Organisas Perangkat Deerah (Renja DYD) Sehresarisa Deerah Provinsi Nita Tahun 2023  Rencana Kepia Organisas Perangkat Deerah (Renja DYD) Sehresarisa Deerah Provinsi Nita Tahun 2023  Rencana Kepia Organisas Perangkat Deerah (Renja DYD) Sehresarisa Deerah Provinsi Nita Tahun 2023  Informasi Kinerja  Berkala  APPERUSIA SOTIA PERANGKAT DERO DIGANISASI SETDA PROV NIT TAHUN 2023  Informasi Kinerja  Berkala  PERBUSIA SOTIA PERANGKAT DERO DIGANISASI SETDA PROV NIT TAHUN 2023  Informasi Kinerja  Regulasi  Seciap Saat  Peranguan Deerah Provinsi NITT Konno 6 Tahun 2023 Terrang Parubahan Kerga Atas Peranasa Deerah Provinsi NIT Norno 9 trahun 2015  Regulasi  Seciap Saat  PERBUSIA PERBUSIA PERBUSIA PERBUSIA DERIA PERBUSIA DERIA PERBUSIA DERIA PERBUSIA DEERA PERBUSIA D	SK TIM KERJA BIRO ORGANISASI 2024	Regulasi	Setiap Saat
Berkala Program dan Kegisaan Berkala Berkala Berkala Program dan Kegisaan Berkala Berkala Berkala Berkala Berkala Program dan Kegisaan Berkala Berkala Berkala Berkala Berkala Berkala Berkala Berkala Program dan Kegisaan Berkala Berkala Berkala Berkala Berkala Program dan Kegisaan Berkala	Daftar Nominatif PNS Biro Organisasi Setda Provinsi NTT Tahun 2024	Profil Badan Publik	Berkala
Began Sruktur Organisasi Biro Organisasi Sekresarias Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Profit Badan Publik Berkala Suney Kepuasan Masyarakat (SMI) pade Biro Organisasi Seda Provinsi NTT Tahun 2023 Informasi Kinerja Informasi I	Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) PNS Biro Organisasi Setda Provinsi NTT Tahun 2024	Profil Badan Publik	Berkala
Survey Kepusan Maryaraka (SMA) pada Biso Organizasi Setida Provinsi NTT Tahun 2023 Informasi Kinerja Setiap Saat  Renzana Kinga Organizasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Sekretariat Daerah Provinsi Niusa Tenggara Timur Tahun 2025 Program dan Kegistan Setiap Saat  Memori Akhir Jabatan Kejala Biro Organizasi Setida Provinsi NTT Periode 16 Juli 2021 s/d Maret 2024  Informasi Kinerja Setiap Saat  LAPORAN PRIO PRIMANTU BIRO ORGANISASI SETIA PROV NTT TAHUN 2023  Informasi Kinerja Rendusi  Regulasi Setiap Saat  PERGUB SOTIK PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NTT  Regulasi Setiap Saat  Pergula Nomori 45 Tahun 2023 tentang Sissem Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT Umuk Penyederhanaan Birokrasi  Regulasi Setiap Saat  Pergulasi Setiap Saat  Informasi Kinerja Regulasi  Setiap Saat  Pergulasi Setiap Saat  Pergulasi Setiap Saat  Liporan Keruangan  Berkala  PERGUB PEDOMAN PELANSANAAN KOIN YANUK 2023  Regulasi Setiap Saat  Liporan Keruangan  Berkala  PERGUB NTT NO 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas  Regulasi Setiap Saat  Daftar Informasi Publikasi Biro Organizasi Setida Provinsi NTT dain Makkumat Pelayanan Tahun 2023  Pergum dan Kegistan Setiap Saat  Daftar Informasi Publikasi Biro Organizasi Setida Provinsi NTT dan Makkumat Pelayanan Tahun 2023  Regulasi Setiap Saat  Regulasi Setiap Saat  Daftar Informasi Publikasi Biro Organizasi Setia Provinsi NTT dan Makkumat Pelayanan Tahun 2023  Regulasi Setiap Saat  Regulasi Setiap Saat  Regulasi Setiap Saat  Regulasi Setiap Saat  Pergunan Ana Kegistan Setiap Provinsi NTT dan Makkumat Pelayanan Tahun 2023  Pergunan Regulasi Setiap Saat  Pergunan Regulasi Setiap Provinsi Regulasi Setiap Provinsi Regulasi Setiap Saat  Pergunan Regulasi Setiap Saat  Pergunan Regulasi Seti	RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SETDA PROVINSI NTT TAHUN 2024-2026	Program dan Kegiatan	Berkala
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Sebretaria Daerah Provinsi Niusa Tanggara Timur Tahun 2025 Program dan Kegalaan Sedap Saac  Informasi Kinerja Sedap Saac  LAPORAN PRID PEMBANTU BIRO ORGANISASI SETDA PROV NIT TAHUN 2023  Informasi Kinerja Berkala  PERGUIB SOTK PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NIT  Regulasi Sedap Saac  Perguin Nomor 45 Tahun 2023 temang Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NIT Umtuk Penyederhanaan Birokrasi Regulasi Sedap Saac  Peraturan Daerah Provinsi NIT Nomor 6 Tahun 2023 Temang Perubahan Ketga Atas Peratusa Daerah Provinsi NIT Nomor 9 trahun 2016 Regulasi Sedap Saac  Peraturan Daerah Provinsi NIT Nomor 6 Tahun 2023 Temang Perubahan Ketga Atas Peratusa Daerah Provinsi NIT Nomor 9 trahun 2016 Regulasi Sedap Saac  Laporan Kenangan Berkala  PERGUIB PEDOMAN PELAKSANAAN KOIN YANUK 2023  Regulasi Sedap Saac  Laporan Kenangan Berkala  PERGUIB NIT NO 62 Tahun 2023 temang Tata Naskah Dinas  Regulasi Sedap Saac  Daetar Informasi Dibelikasi Biro Organisasi Sedap Provinsi NIT Tahun 2023  Program dan Kegatan  Laporan dan procedur Berkala  Berkala  Sedap Saac  Daetar Informasi Dibelikasi Biro Organisasi Sedap Provinsi NIT dan Makhumat Pelayanan Tahun 2023  Regulasi Berkala  Sedap Saac  Setiap Saac  Setiap Saac  Daetar Informasi Dibelikasi Biro Organisasi Sedap Provinsi NIT dan Makhumat Pelayanan Tahun 2023  Regulasi Berkala  Setiap Saac  Setiap Saac  Setiap Saac  Setiap Saac  Setiap Saac  Setiap Saac  Daetar Informasi Dibelikasi Biro Organisasi Seda Provinsi NIT dan Makhumat Pelayanan Tahun 2023  Regulasi Berkala  Setiap Saac  Setiap Saac	Bagan Struktur Organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Profil Badan Publik	Berkala
Memori Ashir Jahastan Kepala Biro Organisasi Serda Provinsi NTT Periode 16 Juli 2021 sid Maret 2024  Informasi Kinerja Berkala  LAPORAN PPID PEMBANTU BIRO ORGANISASI SETIDA PROV NIT TAHUN 2023  Informasi Kinerja Berkala  PERGUBS SOTIK PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NTT  Regulasi Seriap Saat  Perguba Nomori 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT Unsuk Penyederhanaan Birokirasi  Regulasi Seriap Saat  Peraturan Dierah Provinsi NTT Nomori 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peratura Dierah Provinsi NTT Nomori 9 trahun 2016  Regulasi Seriap Saat  LIKPI BIRO ORGANISASI TAHUN 2023  Informasi Kinerja Berkala  PERGUB PEDOMAN PELAKSANAAN KOIN YANLIK 2023  Regulasi Seriap Saat  LIKPI BIO Tahun 2023  LIKPI BIO Tahun 2023 tentang Tara Nasalah Dinas  Regulasi Seriap Saat  LIKPI BIO Tahun 2023 tentang Tara Nasalah Dinas  Regulasi Seriap Saat  LIKPI BIO Tahun 2023 tentang Tara Nasalah Dinas  Regulasi Seriap Saat  Deftar Informasi Publikasi Biro Organisasi Serda Provinsi NTT Tahun 2023  Program dan Kegiatan  Laporan dan Kegiatan  BENCANA KERJA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023  Regulasi Berkala  Seriap Saat  KK Tim PPID Biro Organisasi Tahun 2023  Program dan Kegiatan  Berkala  Regulasi Seriap Saat  Seriap Saat  Seriap Saat  Program dan Kegiatan  Berkala  Regulasi Seriap Saat  Seria	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT Tahun 2023	Informasi Kinerja	Setiap Saat
LAPORAN PPID PEMBANTU BIRO ORGANISASI SETDA PROVINTI TAHUN 2023  Laporan Abraham Daria Pergulasi  APORAN PPID PEMBANTU BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI NITT  Regulasi  Setiap Saat  Pergulasi  Setiap Saat  Setiap Saat  Lipi Biro Organisasi Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NIT Untuk Penyederhanaan Birokrasi  Regulasi  Setiap Saat  Lipi Biro Organisasi Setiap Saat  Daftar Informasi Dikecualikan  Laporan Meuangan  Berkalia  Berkalia  Berkalia  Daftar Informasi Dikecualikan  Laporan Mengulasi  Setiap Saat  Daftar Informasi Dikecualikan  Laporan Mengulasi  Setiap Saat  Daftar Informasi Dikecualikan  Laporan Mengulasi  Setiap Saat  Daftar Informasi Dikecualikan  Regulasi  Setiap Saat  Daftar Informasi Dikecualikan  Laporan Man Kegiatan  Setiap Saat  Daftar Informasi Dikecualikan  Regulasi  Setiap Saat  Daftar Informasi Dikecualikan  Regulasi  Setiap Saat  Pergaman Publik Biro Organisasi Setiab Provinsi NIT dan Maklumat Pelayanan Tahun 2023  Regulasi  Regulasi  Regulasi  Setiap Saat  Program dan Kegiatan  Berkalia  Setiap Saat  Set	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025	Program dan Kegiatan	Setiap Saat
PERGUB SOTK PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NIT  Regulasi  Seciap Saat  Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peratuta Daerah Provinsi NTT Nomor 9 trahun 2016  Regulasi  Seciap Saat  Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peratuta Daerah Provinsi NTT Nomor 9 trahun 2016  Regulasi  Seciap Saat  LKIP BIRO ORGANISASI TAHUN 2023  Informasi Kinerja  Berkala  PERGUB PEDOMAN PELAKSANAAN KOIN YANLIK 2023  Regulasi  Seciap Saat  LAPORAN KERJABIRO ORGANISASI TAHUN 2023 Tentang Tata Naskah Dinas  Regulasi  Seciap Saat  Laporan Keungan  Berkala  PERGUB NIT NO 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas  Regulasi  Seciap Saat  Daftar Informasi Publikasi Biro Organisasi Secta Provinsi NTT Tahun 2023  Program dan Kegistan  Laporan dan prosedur alae informasi Dikecualikan  Laporan dan prosedur alae informasi Dikecualikan  Laporan dan Pelaka Biro Organisasi Secta Provinsi NTT dan Maklumat Pelayanan Tahun 2023  Regulasi  Seciap Saat  Seciap	Memori Akhir Jabatan Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT Periode 16 Juli 2021 s/d Maret 2024	Informasi Kinerja	Setiap Saat
Pergub Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT Untuk Penyederhanaan Birokrasi  Regulasi  Setiap Saat  Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peratura Daerah Provinsi NTT Nomor 9 trahun 2016  Regulasi  Setiap Saat  LKIP BIRO ORGANISASI TAHUN 2023  Informasi Kinerja  Berkala  PERGUB PEDOMAN PELAKSANAAN KOIN VANLIK 2023  Regulasi  Setiap Saat  LKPJ BO Tahun 2023  Laporan Keuangan  Berkala  PERGUB NTT NO 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas  Regulasi  Setiap Saat  Daftar Informasi Publikasi Biro Organisasi Setia Provinsi NTT Tahun 2023  Program dan Kegiatan  Setiap Saat  Daftar Informasi Publikasi Biro Organisasi Setia Provinsi NTT Tahun 2023  Program dan Kegiatan  Setiap Saat  Setiap	LAPORAN PPID PEMBANTU BIRO ORGANISASI SETDA PROV NTT TAHUN 2023	Informasi Kinerja	Berkala
Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peratura Daerah Provinsi NTT Nomor 9 trahun 2016 Regulasi Setiap Saat LKIP BIRO ORGANISASI TAHUN 2023 Informasi Kinerja Berkala PERGUB PEDOMAN PELAKSANAAN KOIN YANLIK 2023 Regulasi Setiap Saat LKIP BO Tahun 2023 Laporan Keuangan Berkala PERGUB NTT NO 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Regulasi Setiap Saat  Daftar Informasi Publikasi Biro Organisasi Setida Provinsi NTT Tahun 2023 Program dan Kegidatan Berkala Berkala Berkala RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023 Program dan Kegidatan Berkala Setiap Saat  Setiap Saat  Setiap Saat  Setiap Saat  Setiap Saat  Setiap Saat  Laporan dan Kegidatan Berkala Berkala Standar Pelayanan Publik Biro Organisasi Setia Provinsi NTT dan Maklumat Pelayanan Tahun 2023 Regulasi Berkala  Setiap Saat  Setiap S	PERGUB SOTK PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NTT	Regulasi	Setiap Saat
Tentang Pembentukkan Dan Susuna Perangkat Daerah Provinsi NTT  Ikip BiRO ORGANISASI TAHUN 2023  Informasi Kinerja  Regulasi  Setiap Saat  LKPJ BO Tahun 2023  Laporan Keuangan  Berkala  PERGUB PEDOMAN PELAKSANAAN KOIN YANLIK 2023  Laporan Keuangan  Berkala  PERGUB NTT NO 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas  Regulasi  Setiap Saat  Daftar Informasi Publikasi Biro Organisasi Setia Provinsi NTT Tahun 2023  Program dan Kegiatan  Berkala  Berkala  RENCANA KERIA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023  Program dan Kegiatan  Berkala  Setiap Saat  Setiap Saat  Berkala  Regulasi  Berkala  Setiap Saat  Regulasi  Berkala  Program dan Kegiatan  Berkala  Regulasi  Regulasi  Setiap Saat  Seti	Pergub Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT Untuk Penyederhanaan Birokrasi	Regulasi	Setiap Saat
Regulasi Setiap Saat  Laporan Keuangan Berkala  Laporan Keuangan Berkala  PERGUB NTT NO 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas  Regulasi Setiap Saat  Daftar Informasi Publikasi Biro Organisasi Setda Provinsi NTT Tahun 2023  Program dan Kegiatan Setiap Saat  Laporan dan prosedur akses informasi Dikecualikan  Laporan dan prosedur akses informasi Perkala  Berkala  Berkala  Setiap Saat  Berkala  Berkala  Setiap Saat  Program dan Kegiatan Berkala  Berkala  Setiap Saat  Berkala  Setiap Saat  Berkala  Berkala  Setiap Saat  Berkala  Setiap Saat  Berkala  Setiap Saat  Berkala  Setiap Saat  Setiap Saat  Regulasi Berkala  Setiap Saat  Regulasi Berkala  Berkala  Setiap Saat  Setiap S	Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peratuta Daerah Provinsi NTT Nomor 9 trahun 2016 Tentang Pembentukkan Dan Susuna Perangkat Daerah Provinsi NTT	Regulasi	Setiap Saat
Laporan Keuangan Berkala  PERGUB NTT NO 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas  Regulasi Setiap Saat  Daftar Informasi Publikasi Biro Organisasi Setda Provinsi NTT Tahun 2023  Program dan Kegiatan Setiap Saat  Laporan dan prosedur akses informasi  Berkala  BERNCANA KERJA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023  Program dan Kegiatan Berkala  Standar Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Provinsi NTT dan Maklumat Pelayanan Tahun 2023  Regulasi Berkala  SOP Biro Organisasi  Regulasi Setiap Saat  SKT Im PPID Biro Organisasi Tahun 2023  Regulasi Berkala  Program dan Kegiatan Berkala  Perjanjian Kinerja Berjenjang Biro Organisasi Tahun 2023  Informasi Kinerja Berkala  Program dan Kegiatan Serta Merta	LKIP BIRO ORGANISASI TAHUN 2023	Informasi Kinerja	Berkala
PERGUB NTT NO 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas  Regulasi  Setiap Saat  Program dan Kegiatan  Setiap Saat  Daftar Informasi Publikasi Biro Organisasi Setda Provinsi NTT Tahun 2023  Program dan Kegiatan  Laporan dan prosedur akses informasi  Berkala  RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023  Program dan Kegiatan  Berkala  Standar Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Provinsi NTT dan Maklumat Pelayanan Tahun 2023  Regulasi  Berkala  SOP Biro Organisasi  Regulasi  Setiap Saat  Regulasi  Berkala  SKTim PPID Biro Organisasi Tahun 2023  Regulasi  Berkala  Program dan Kegiatan  Berkala  Perjanjian Kinerja Berjenjang Biro Organisasi Tahun 2023  Informasi Kinerja  Berkala  Pakta Integritas Biro Organisasi Tahun 2023  Program dan Kegiatan  Serta Merta	PERGUB PEDOMAN PELAKSANAAN KOIN YANLIK 2023	Regulasi	Setiap Saat
Daftar Informasi Publikasi Biro Organisasi Setda Provinsi NTT Tahun 2023 Program dan Kegiatan Laporan dan prosedur akses informasi Berkala  Berkala  Berkala  Berkala  Berkala  Berkala  Berkala  Standar Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Provinsi NTT dan Maklumat Pelayanan Tahun 2023 Regulasi Berkala  Setiap Saat  Regulasi Berkala  Setiap Saat  Regulasi Berkala  Setiap Saat  Regulasi Berkala  Setiap Saat  Regulasi Berkala  Program dan Kegiatan Berkala  Repulasi Berkala  Repulasi Berkala  Repulasi Berkala  Repulasi Berkala  Repulasi Berkala  Perjanjian Kinerja Berjenjang Biro Organisasi Tahun 2023 Informasi Kinerja Berkala  Pergam dan Kegiatan Berkala  Perjanjian Kinerja Berjenjang Biro Organisasi Tahun 2023 Program dan Kegiatan Berkala  Setiap Saat  Setiap Sa	LKPJ BO Tahun 2023	Laporan Keuangan	Berkala
Daftar Informasi Dikecualikan  Laporan dan prosedur akses informasi  RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023  Program dan Kegiatan  Berkala  Berkala  Standar Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Provinsi NTT dan Maklumat Pelayanan Tahun 2023  Regulasi  Regulasi  Setiap Saat  SK Tim PPID Biro Organisasi Tahun 2023  Regulasi  Berkala  Berkala  Program dan Kegiatan  Berkala  Perjanjian Kinerja Berjenjang Biro Organisasi Tahun 2023  Informasi Kinerja  Berkala  Program dan Kegiatan  Serta Merta	PERGUB NTT NO 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas	Regulasi	Setiap Saat
akses informasi Dikecualikan akses informasi akses informasi akses informasi akses informasi akses informasi akses informasi Berkala Program dan Kegiatan Berkala Program dan Kegiatan Berkala Regulasi Berkala Regulasi Berkala SOP Biro Organisasi Atlanu 2023 Regulasi Setiap Saat Regulasi Berkala Regulasi Berkala Program dan Kegiatan Berkala Perjanjian Kinerja Berjenjang Biro Organisasi Tahun 2023 Perjanjian Kinerja Berjenjang Biro Organisasi Tahun 2023 Program dan Kegiatan Berkala Program dan Kegiatan Serta Merta	Daftar Informasi Publikasi Biro Organisasi Setda Provinsi NTT Tahun 2023	Program dan Kegiatan	Setiap Saat
RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023  Program dan Kegiatan  Regulasi  Regulasi  Regulasi  Setiap Saat  Regulasi  Regulasi  Regulasi  Berkala  SOP Biro Organisasi  Regulasi  Regulasi  Berkala  Program dan Kegiatan  Berkala  Perjanjian Kinerja Berjenjang Biro Organisasi Tahun 2023  Pakta Integritas Biro Organisasi Tahun 2023  Program dan Kegiatan  Serta Merta	Daftar Informasi Dikecualikan		Berkala
Regulasi Setiap Saat  Regulasi Regulasi Berkala  Rencana Aksi Biro Organisasi Tahun 2023 Program dan Kegiatan Berkala  Perjanjian Kinerja Berjenjang Biro Organisasi Tahun 2023 Informasi Kinerja Berkala  Pakta Integritas Biro Organisasi Tahun 2023 Program dan Kegiatan Serta Merta	RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023	Program dan Kegiatan	Berkala
Regulasi Berkala  Rencana Aksi Biro Organisasi Tahun 2023  Program dan Kegiatan Berkala  Perjanjian Kinerja Berjenjang Biro Organisasi Tahun 2023  Informasi Kinerja Berkala  Pakta Integritas Biro Organisasi Tahun 2023  Program dan Kegiatan Serta Merta	Standar Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Provinsi NTT dan Maklumat Pelayanan Tahun 2023	Regulasi	Berkala
Rencana Aksi Biro Organisasi Tahun 2023  Program dan Kegiatan  Berkala  Perjanjian Kinerja Berjenjang Biro Organisasi Tahun 2023  Informasi Kinerja  Berkala  Pakta Integritas Biro Organisasi Tahun 2023  Program dan Kegiatan  Serta Merta	SOP Biro Organisasi	Regulasi	Setiap Saat
Perjanjian Kinerja Berjenjang Blro Organisasi Tahun 2023  Pakta Integritas Biro Organisasi Tahun 2023  Program dan Kegiatan  Serta Merta	SK Tim PPID Biro Organisasi Tahun 2023	Regulasi	Berkala
Pakta Integritas Biro Organisasi Tahun 2023 Program dan Kegiatan Serta Merta	Rencana Aksi Biro Organisasi Tahun 2023	Program dan Kegiatan	Berkala
	Perjanjian Kinerja Berjenjang Blro Organisasi Tahun 2023	Informasi Kinerja	Berkala
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022. Informasi Kinerja Berkala	Pakta Integritas Biro Organisasi Tahun 2023	Program dan Kegiatan	Serta Merta
	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022	Informasi Kinerja	Berkala

#### D. Informasi yang Dikecualikan

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengecualian Informasi Publik harus sesuai dengan undang-undang, kepatuhan dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripda membukanya atau sebaliknya. Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dipublikasikan pada website PPID, seperti yang disajikan dalam tabel 3:

Tabel 3. Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Biro Organisasi Setda Provinsi NTT

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Dibuka Ditutup		Jangka Waktu
1	SK	Pasal 17 huruf h	Data pribadi	Menjaga	Selama
	hukuman	angka 1 UU	pegawai yang	privasi dan	menjadi
	disiplin	No.14/2008 tentang	bersifat	melindungi	pegawai dan
		Keterbukaan	rahasia jadi	penyalahgunaa	apabila
		Informasi Publik	terungkap	n data yang	mendapat
				bersangkutan	persetujuan
					dari yang
					bersangkutan
2	Laporan	P Pasal 17 huruf h	Belum	Laporan yang	Samapai
	keuangan	angka 3 UU	terjaminnya	belum diaudit	selesai proses
	yang	No.14/2008 tentang	kebenaran	tidak ter-	audit
	belum	Keterbukaan	informasi	eskpose	
	diaudit	Informasi Publik			

#### E. Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi

Sepanjang Tahun 2024 tidak terdapat keberatan dan sengketa informasi yang diterima maupun ditangani oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### F. Kendala dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama tahun 2024 terdapat beberapa kendala yang dihadapi secara internal antara lain :

- Tidak ada penganggaran untuk kegiatan PPID Pembantu dikarenakan keterbatasan anggaran;
- Tidak ada ruangan khusus untuk Sekretariat PPID yang dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai disebabkan sarana dan prasarana lebih banyak digunakan untuk keperluan rutin;

#### **BAB IV**

#### RENCANA TINDAK LANJUT DAN KESIMPULAN

#### A. Rencana Tindak Lanjut

Melihat permasalahan dan kendala yang ada di Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu dilakukan beberapa hal dalam rangka tindak lanjut antara lain :

- Melakukan perbaikan dan meningkatkan sistem pengamanan website resmi Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan berkorrdinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT agar segera dapat selalu berfungsi dengan baik;
- 2. Melalukan pengelolaan dan penyediaan informasi yang lebih baik dengan menyediakan data secara berkala dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*;
- 3. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatan PPID dan penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya;
- 4. Perlu dilaksanakan penguatan komitmen dan kapasitas Pejabat PPID di Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 5. Perlu peningkatan koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu melalui rapat/desk.

#### B. Kesimpulan

Dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan, pengelolaan dan penyediaan informasi publik di Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berjalan dan dilaksanakan dengan baik. Namum demikian, pelayanan belum dilakukan secara maksimal dan masih perlu ditingkatkan terutama terhadap peningkatan komitmen dan kapasitas sumber daya manusia pengelola informasi dan dokumentasi publik, pengadaan sarana dan prasarana penunjang untuk menjalankan dan mengelola serta melayani permohonan informasi publik dengan baik.

#### BAB V

#### **PENUTUP**

Demikian Laporan PPID Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dibuat, semoga menjadi bahan evauasi kinerja bagi pengelolaan PPID kedepan yang belum tercapai dan dapat menambah motivasi dalam meningkatkan kinerja PPID di tahun selanjutnya.

Kupang, Februari 2025

Plt. Kepala Biro Organisasi Seketariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

> Djoese S. M. Nai Buti, S.Pt, M.Si Pembina Tingkat I (IV/b) NIP 197103291999031002



# PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SEKRETARIAT DAERAH Jl. Raya El Tari Nomor 52, Kota Kupang 85111

Laman: biroorgani-rb.nttprov.go.id

#### KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 400.14.3/16a/BO1.1

#### **TENTANG**

#### PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI **BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH** PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

#### KEPALA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

#### Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 91/KEP/HK/2019 telah ditetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- tersedianya b. bahwa untuk informasi yang dipertanggungjawabkan perlu di dukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi lingkungan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

#### Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi

- Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6810);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157):
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 031).

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Biro

Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Timur Tahun 2023.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

mempunyai kedudukan dan rincian tugas sebagaimana

tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Biro Organisasi

merupakan kontributor informasi publik yang memiliki tugas dan tanggungjawab pengelolaan data dan informasi publik

sesuai dengan fokus kerjanya masing-masing.

KEEMPAT : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Biro Organisasi

dalam pelaksanaan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara

Timur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 16 Januari 2023

Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT,



## Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.

Pembina Utama Muda NIP 196606241986022006

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI NTT

NOMOR : 400.14.3/16a/BO1.1 TANGGAL : 16 JANUARI 2023

# TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARATIMUR TAHUN 2023

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan	Rincian Tugas
1	2	3	4
1.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Pengarah	<ul> <li>a) Merumuskan kebijakan, strategi dan program Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT;</li> <li>b) Melakukan koordinasi, pengendalian dan pemantapan pelaksanaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu; dan</li> <li>c) Mengembangkan dan mengarahkan pelaksanaan Dokumentasi Pembantu untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.</li> </ul>
2.	Kepala Bagian Tata Laksana	Koordinator Tatalaksana	a) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Biro
	a. Analis Kebijakan Ahli Muda (Tatalaksana Pemerintahan) b. Analis Kebijakan Ahli Muda (Pelayanan Publik)	Anggota	Organisasi Setda Provinsi NTT; b) Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses sengeketa informasi yang diajukan pemohon c) Melakukan evaluasi dan
4.	Kepala Bagian	Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan	pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan	Rincian Tugas
1	2	3	4
	a. Analis Kebijakan Ahli Muda (Kelembagaan) b. Analis Kebijakan Ahli Muda (Analisis Jabatan)	Anggota	d) Memeriksa dan memverifikasi permohonan keberatan informasi; dan e) Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
6.	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja  a. Analis Kebijakan Ahli Muda (Reformasi Birokrasi) b. Analis Kebijakan Ahli Muda (Akuntabilitas Kinerja)	Koordinator Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Anggota	
8.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha  a. Johanis Dominggus Kale, S.Pt b. Theresia Firmiati Gelok, S.E., M.M	Anggota	<ul> <li>a) Memfasilitasi pelaksanaan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan informasi publik;</li> <li>b) Menyiapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) layanan informasi publik.</li> <li>c) Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;</li> <li>d) Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses publik;</li> <li>e) Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID Utama;</li> <li>f) Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip layanan informasi publik;</li> <li>g) Mencatat permohonan informasi dalam register pemohon;</li> <li>h) Menyusun daftar informasi publik;</li> <li>i) Memberikan masukan kepada atasan dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon</li> <li>j) Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasi serta uji konsekuensi informasi publik; dan</li> <li>k) Membantu menyelesaikan sengketa publik</li> </ul>

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan	Rincian Tugas
1	2	3	4
6.	a. Agustinus Randyson, S.STP b. Elscha Liany Chintia Klaas, S.Kom	Anggota/Admin Kelembagaan dan Analisis Jabatan	a) Mengklasifikasi informasi yang terdiri dari:  1) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;  2) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan 3) Informasi yang
			dikecualikan. b) Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi public yang ada dilingkungannya; c) Mengkoordinasikan dan
	<ul> <li>a. Louisa Kristofora     Lake, S.T</li> <li>b. Halimah Abdullah,     SE</li> <li>c. Petrus Damasus     Wawo Aja, S.STP</li> </ul>	Anggota/Admin Tatalaksana	mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya; d) Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan
	a. Vitarianda Angelina Taka, S.STP b. Daniel Melkias Libing, S.STP	Anggota/Admin Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;  e) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya; dan  f) Membuat dan mengumpulkan data layanan informasi publik;

Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT,



Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.

Pembina Utama Muda NIP 196606241986022006